



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019-2024

MARET, 2022

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2014 dapat diselesaikan.

Rancangan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, Sub Kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada perubahan struktur organisasi serta penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka disusunlah rancangan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Rancangan perubahan Rencana Strategis ini nantinya akan disahkan dan ditetapkan sebagai Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun sisa pelaksanaan Renstra.

Surabaya, 9 Maret 2022

 **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR** 

M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si. CIPA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770323 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah serta dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) termasuk diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan Struktur Organisasi menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang mengalami perubahan pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi, indikator dan/atau target Perangkat Daerah.

Latar belakang dilaksanakannya perubahan renstra meliputi :

1. Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran

- klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 3. Adanya Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional berdampak pada refocusing anggaran serta perubahan kondisi makro ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja pembangunan.

Penyusunan perubahan Renstra ini merupakan langkah sinergitas program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi wilayah Provinsi Jawa Timur yang tenteram, tertib dan teratur. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf (e) yang meliputi ”ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat “.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan struktur organisasi yang baru dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok

- dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan;
 5. Mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program lima tahunan, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
 6. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program/kegiatan serta akuntabilitasnya.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Satuan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengoordinasian pembinaan, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan tugas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- g. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Perangkat Daerah lainnya;
- h. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, kerja sama, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan aparatur, pelatihan teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pengoordinasian pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Struktur Organisasi

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- 2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3. pengelolaan administrasi keuangan;
- 4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelidikan, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. pelaksanaan bimbingan teknis penyidikan dan penindakan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. pengelolaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan jajaran samping bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
9. penyusunan bahan pertimbangan materi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan Peraturan Daerah; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan dan kerja sama antar lembaga dan dunia usaha antara Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi dan antar provinsi berdampingan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. penyusunan dan rancangan pengendalian operasional dan pengendalian pelaksanaan patroli, pengamanan, pengawalan serta pengendalian massa;
3. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. penyusunan bahan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, antar daerah dan dunia usaha instansi lain, antar lintas provinsi dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta ketenteraman dan ketertiban umum;
5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
6. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam pelanggaran peraturan daerah dan pelaturan pelaksanaannya

7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
2. Seksi Kerja Sama.

d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2. pelaksanaan validasi rekomendasi teknis kelayakan sistem keselamatan kebakaran pada bangunan gedung Provinsi dan Kabupaten/Kota yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan pemutakhiran peta rawan kebakaran, rencana operasi, dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
4. pelaksanaan program pencegahan kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan;
5. pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pemutakhiran dokumen, kajian resiko kebakaran, rencana operasi, penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, serta pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi kebakaran dan penyelamatan;
6. penyusunan kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran lingkup daerah, pembinaan, pengawasan dan pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal dan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;

7. pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang pencegahan kebakaran dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 8. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pendampingan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 9. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas serta sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi kelompok masyarakat serta dunia usaha;
 10. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan, pendistribusian, pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 11. pelaksanaan program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengolahan serta penyajian data kebakaran dan penyelamatan;
 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Data.
- e. Bidang Pelindungan Masyarakat

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pelindungan masyarakat.

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pelindungan masyarakat;
2. pengoordinasian kegiatan pelindungan masyarakat;
3. penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan pelindungan masyarakat;
4. pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas;
5. pengolahan data dan penyusunan informasi Satlinmas;
6. pelaksanaan sosialisasi pembinaan peringatan dini sebelum bencana, penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait peringatan dini sebelum bencana penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
8. pelaksanaan simulasi pengamanan swakarsa;
9. pelaksanaan pengamanan swakarsa;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

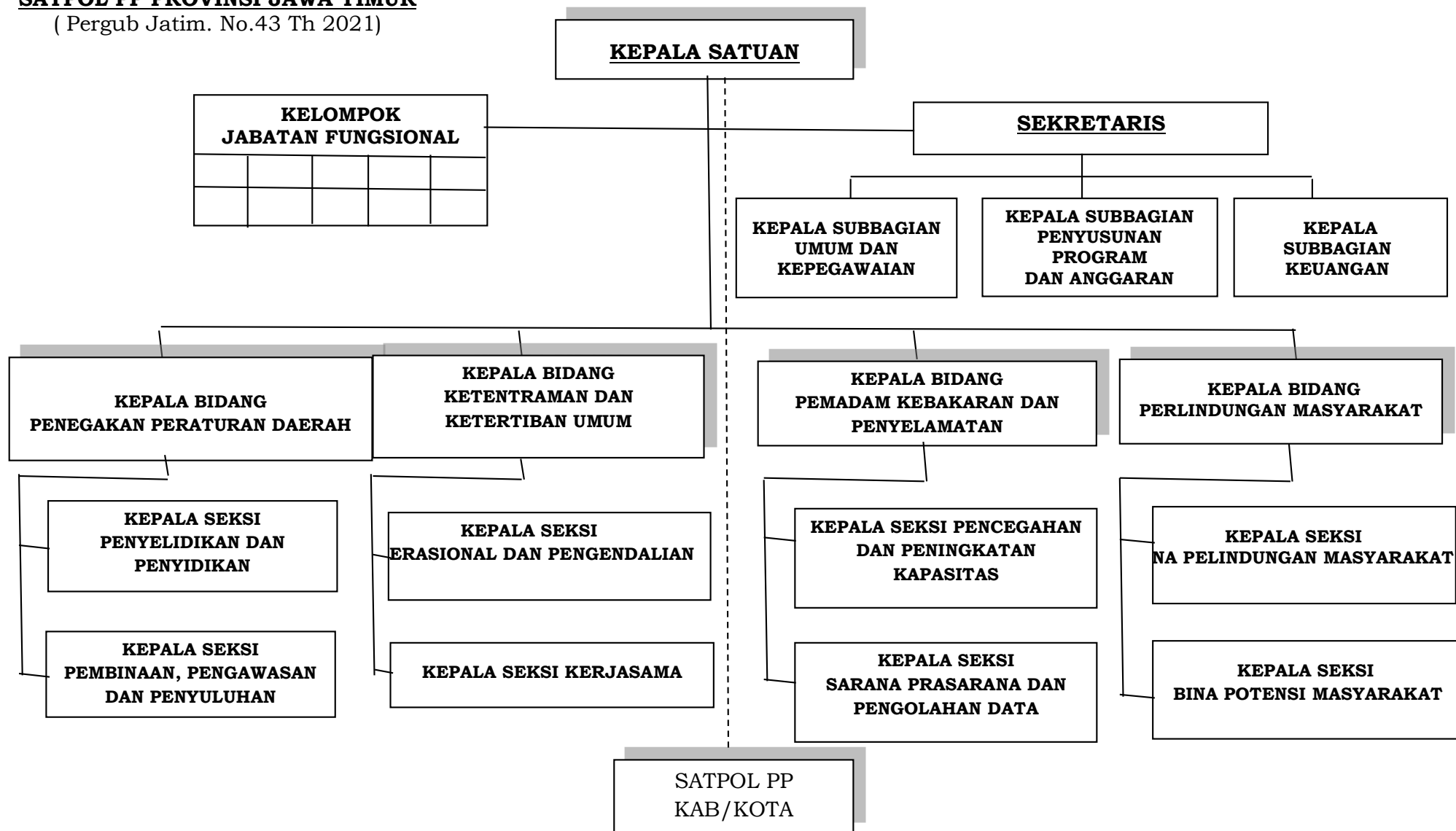
Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari 26 orang dalam rumpun jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR
(Pergub Jatim. No.43 Th 2021)



g. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, kompeten, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam mengemban urusan wajib pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sejumlah 197 orang, terdiri dari 131 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 67 orang Tenaga Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) dengan pengklasifikasi kepegawaian sebagai berikut :

a. Jabatan

Dari jumlah PNS di Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Jawa Timur yang keseluruhan berjumlah 131 orang, terdiri dari :

1. Struktural : 17 orang
2. Fungsional : 26 orang
3. Pelaksana : 88 orang

b. Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina	IV	12
Penata	III	53
Pengatur	II	66
Jumlah		131

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Pendidikan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
S-2	16	SLTA	45
S-1	68	SD	1
D-III	1		
Jumlah			131

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat 26 orang PNS pada jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah
1	Polisi Pamong Praja	Ahli Madya	1
2	Polisi Pamong Praja	Ahli Muda	1
3	Polisi Pamong Praja	Ahli Pertama	7
4	Polisi Pamong Praja	Terampil	15
5	Pranata Komputer	Ahli Pertama	1
6	Pengadaan Barang dan Jasa	Ahli Pertama	1
Jumlah			26

4. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Objek	Keterangan	Jumlah	Nilai/Harga
1	1.3.1.01	Tanah	1	9.610.000.000
2	1.3.2.01	Alat besar	3	278.520.000
3	1.3.2.02	Alat angkutan	94	6.933.005.628
4	1.3.2.03	Alat bengkel dan alat ukur	5	30.514.000
5	1.3.2.05	Alat kantor dan rumah tangga	1.042	3.396.589.920
6	1.3.2.06	Alat studio komunikasi dan pemancar	170	1.636.641.210
7	1.3.2.09	Alat persenjataan	398	180.505.450

8	1.3.2.10	Alat komputer	197	2.133.534.700
9	1.3.3.01	Bangunan gedung	2	3.982.467.100
10	1.3.4.04	Jaringan	1	39.175.950
11	1.3.5.02	Barang bercorak keseniaan/kebudayaan	378	1.709.347.645
Jumlah			2.291	29.930.301.603

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan Renstra (2019-2021) mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis meliputi :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perUndang-Undangan Daerah;
2. Meningkatnya ketertiban umum masyarakat;
3. Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran.

Serta Sasaran Startegis baru sesuai Permendagri nomor 90 Tahun 2019 :

4. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan di perubahan Renstra 2019-2014 untuk pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2024 terdapat penambahan sasaran strategis baru sesuai Permendagri 16 Tahun 2020 :

5. Terwujudnya penyelenggaraan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur.

Selain tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dalam mendukung Nawa Bhakti melalui Bhakti 9 : Harmoni, Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan serta melaksanakan dan meningkatkan partisipasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor dan elemen.

Capaian indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Tabel T.C.23

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Timur	Target Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perUndang-Undangan Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	5%	5%					4,60%	5%			
	Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran	Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang terlatih	5%	5%					7,08%	4,44%			
2021-2022													
Permendagri 90 Tahun 2019													
	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas			80%	85%	90%	95%					
Permendagri 16 Tahun 2020													
	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran				80%	85%	90%					

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran		Rasio Realisasi Anggaran		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Tahun 2019													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.186.140.000						1.114.585.408		88,15%		-	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.186.140.000						1.114.585.408		88,15%		-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.287.709.000						5.361.588.474		94,54%		-	
	Penyediaan Peralatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.807.200.000						3.448.634.084		93,24%		-	
	Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Kelengkapan sarana dan prasarana	1.480.509.000						1.912.854.390		96,98%		-	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	5.702.522.000						7.466.359.918		93,26%		-	
	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1.656.502.000						2.121.897.621		85,97%		-	
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	4.046.020.000						5.344.462.297		96,51%		-	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	461.394.000						441.063.500		95,59%		-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	16.919.000						11.822.300		69,88%		-	
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	16.825.000						10.374.200		61,66%		-	
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	61.200.000						56.265.000		91,94%		-	
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	366.450.000						362.602.000		98,95%		-	

Tahun 2020													
	Program Pelayanan Kesekretariatan		13.657.832.500					13.414.764.984		98,22%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		274.439.000					259.898.000		94,70%			
	Pengelolaan Administrasi Keuangan		475.789.000					471.197.700		99,04%			
	Ketatausahaan dan Kepegawaian		12.907.604.500					12.683.669.284		98,27%			
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.378.000.000	1.406.657.088				2.593.779.540	1.399.739.014	96,86%	99,51%	-1.194.040.526	-46,03%	
	Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting	300.000.000	240.400.000				446.733.271	240.171.595	99,03%	99,90%	-206.561.676	-46,24%	
	Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	200.000.000	127.389.000				269.812.000	126.230.000	97,58%	99,09%	-143.582.000	-53,22%	
	Patroli Wilayah Trantibum	1.200.000.000	659.573.338				1.153.305.741	658.849.538	96,80%	99,89%	-494.456.203	-42,87%	
	Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas	677.200.000	379.294.750				723.928.528	374.487.881	95,38%	98,73%	-349.440.647	-48,27%	
	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda	1.971.100.000	657.109.687				1.889.188.780	636.903.080	95,84%	96,92%	-1.252.285.700	-66,29%	
	Penegakkan Peraturan Daerah	1.186.900.000	336.763.370				1.121.185.890	322.109.075	94,46%	95,65%	-799.076.815	-71,27%	
	Penyuluhan, Pengawasan dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah	784.200.000	320.346.317				768.002.890	314.794.005	97,93%	98,27%	-453.208.885	-59,01%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.720.566.000	694.647.600				1.686.784.595	676.728.294	98,04%	97,42%	-1.010.056.301	-59,88%	
	Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	469.866.000	160.410.600				462.653.824	154.588.600	98,47%	96,37%	-308.065.224	-66,59%	
	Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)	1.000.700.000	326.556.000				979.981.084	319.714.924	97,93%	97,91%	-660.266.160	-67,38%	
	Pemberdayaan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran	250.000.000	207.681.000				244.149.687	202.424.770	97,66%	97,47%	-41.724.917	-17,09%	
	Program Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	1.350.000.000	619.453.350				1.299.400.260	610.061.900	96,25%	98,48%	-689.338.360	-53,05%	
	Pelatihan Kesamaptaaan Anggota Satpol PP se Jatim	650.000.000	304.453.350				654.377.950	300.976.400	96,16%	98,86%	-353.401.550	-54,01%	
	Bimbingan Teknis Aparat Satpol PP	300.000.00	185.000.000				283.822.380	184.017.700	94,61%	99,47%	-99.804.680	-35,16%	
	Pelatihan SDM dan Performance PPNS se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP	400.000.000	130.000.000				361.199.930	125.067.800	97,75%	96,21%	-236.132.130	-65,37%	

Permendagri 19 Tahun 2019													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	35.691.152.000	41.044.824.800	42.115.559.360	42.829.382.400	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	163.950.000	188.542.500	193.461.000	196.740.000	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	28.765.398.000	33.080.207.700	33.943.169.640	34.518.477.600	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	209.000.000	240.350.000	246.620.000	250.800.000	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.220.054.000	6.003.062.100	6.159.663.720	6.264.064.800	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	144.250.000	165.887.500	170.215.000	173.100.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	766.000.000	880.900.000	903.880.000	919.200.000	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	422.500.000	485.875.000	498.550.000	507.000.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	-	150.925.023.620	173.563.777.163	178.091.527.872	181.110.028.344	-	-	-	-	-	-
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	2.685.566.000	3.088.400.900	3.168.967.880	3.222.679.200	-	-	-	-	-	-
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	-	750.000.000	862.500.000	885.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-	150.000.000	172.500.000	177.000.000	180.000.000	-	-	-	-	-	-
	BELANJA HIBAH UANG UNTUK PEMERINTAH PUSAT	-	-	147.339.457.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permendagri 16 Tahun 2020													
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				400.000.000	400.000.000	400.000.000						
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				200.000.000	200.000.000	200.000.000						
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				200.000.000	200.000.000	200.000.000						

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Timur guna menghasilkan kebijakan dan strategi yang tepat, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tantangan meliputi :

- a. Tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Jawa Timur dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat.
- b. Perubahan perilaku sosial yang sangat individualis, sikap apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan dan juga munculnya gerakan radikal seperti halnya teroris dan ujaran kebencian pada kelompok tertentu.
- c. Perubahan gaya hidup generasi muda yang berada dalam dunianya sendiri. Hal ini sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang mengubah perilaku dan gaya hidup dalam masyarakat. Generasi baru hidup dengan nilai baru yang dikembangkan dan mengabaikan nilai-nilai sosial lama yang diwariskan sebagai budaya sosial. Hal ini menimbulkan gap tersendiri dalam cara pandang yang kemudian membuat adanya potensi konflik atau kerentanan sosial antar generasi.

2. Peluang meliputi :

- a. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah ditetapkan sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, akan berdampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang juga didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan

anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satpol PP untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman dan teratur dalam masyarakat dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

- b. Perkembangan teknologi dan informatika yang merupakan akibat dari adanya revolusi industri 4.0, penyelenggaraan ketentermaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.
- c. Dukungan regulasi nasional terkait optimalisasi penyelenggaraan ketentermaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta didukung dengan kemauan daerah membuat regulasi daerah berupa Perda Trantibum sebagai pedoman tata kehidupan sosial masyarakat lokal. Hal ini tentunya menjadi instrumen yang jelas bagi aparat dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Tabel T.B.35

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	Tingginya pelanggaran Perda/Perkada	Kurangnya pelibatan masyarakat terhadap penegakan Perda/Perkada
2	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan dan sinkronisasi data trantibum	Belum optimalnya kegiatan bersama sesuai naskah perjanjian kerjasama	Belum adanya rencana aksi tindak lanjut naskah perjanjian kerjasama
		Belum adanya pemetaan daerah rawan gangguan trantibum	Format permintaan data penyelenggaraan trantibum yang beragam
3	Belum optimalnya pemberdayaan Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Kegiatan linmas terbatas pada penjagaan kegiatan kemasyarakatan dan Pemilu	Terbatasnya pelatihan SDM dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan Satlinmas
4	Belum optimalnya penanganan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Belum adanya pemetaan daerah rawan kebakaran	Belum optimalnya penguatan kelembagaan damkar dan penyelamatan

Berdasarkan tabel diatas, permasalahan/hambatan dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi dan koordinasi langkah-langkah preventif penegakan Perda/Perkada yang diinisiasi oleh Dinas/Instansi pengampu Perda/Perkada dengan melibatkan Satpol PP, sehingga pada saat sudah terjadi pelanggaran, baru melibatkan Satpol PP. Hal tersebut memberi kesan pada masyarakat Satpol PP sebagai tukang gusur, karena tidak dihadirkan/tidak ada di tengah masyarakat saat sosialisasi dan langkah-langkah preventif sebelumnya.
2. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam Penegakan Perda/Perkada, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda/Perkada masih rendah. Hal tersebut diperberat dengan stigma negatif yang masih melekat di Satpol PP. Selain itu, keadaan pandemi yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan tingginya angka pelanggaran Perda.
3. Upaya mensinergikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah dilakukan salah satunya melalui penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun, belum ada rencana aksi tindak lanjut pasca penandatanganan tersebut, sehingga sinergitas dengan Kabupaten/Kota belum optimal.
4. Belum tersedianya data kerawanan/gangguan trantibum di daerah secara holistik dan terintegrasi yang menjadi dasar rencana aksi dan persamaan cara tindak dalam penyelenggaraan trantibum.
5. Pelibatan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) masih sebatas pada penjagaan kegiatan kemasyarakatan dan Pemilu, Sedangkan pada kegiatan trantibum, bencana dan kebakaran masih belum optimal karena terbatasnya pelatihan peningkatan SDM Satlinmas.
6. Dengan adanya perubahan SOTK Satpol PP Provinsi Jawa Timur yang mengakomodasi Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, bahwa terdapat Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat Provinsi untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur.

Minimnya SDM damkar yang sesuai dengan Permendagri 16 Tahun 2019 serta pelatihan bagi balakar dan masyarakat menjadi permasalahan tersendiri.

7. Pandemi Covid-19 dengan berbagai dinamika perkembangan varian baru, Penambahan tugas dan fungsi Satuan serta pencapaian peningkatan target kinerja memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan anggaran tidak sesuai dengan persentase yang ditentukan serta adanya refocusing anggaran menjadi permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Timur.

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih, adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;

3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mengacu pada misi ketiga RPJMD pada tujuan “Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan” dengan sasaran “Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat” dan sasaran kedua “Terwujudnya penyelenggaraan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum adalah “Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Sebagai Perangkat Daerah Provinsi pengampu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya keadaan aman dan nyaman di masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan

kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Secara prinsip pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Timur mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur secara merata untuk menjamin kondusif seluruh wilayah Jawa Timur. Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur belum diprioritaskan karena sampai dengan saat ini sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga penegakan Perda ini belum dapat dilaksanakan.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dengan mempertimbangkan akar permasalahan yang muncul dari perangkat daerah, renstra Kementerian dan Lembaga, RPJMD Provinsi, RTRW dan KLHS. Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan patroli pada kegiatan penegakan Perda/Perkada melalui pembentukan dan pemberdayaan Kader Penegak Perda (Kakanda) serta penguatan PPNS.
2. Mengoptimalkan sinergitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan sinkronisasi data melalui penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Kabupaten/Kota serta pembangunan dan pengembangan media center.
3. Mengoptimalkan pelibatan Satlinmas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas di Desa melalui pembentukan dan pemberdayaan Desa SIGAP.
4. Mengoptimalkan penguatan kelembagaan damkar dengan pemenuhan aparatur damkar yang sesuai dengan kualifikasi dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja berorientasi pada berkurangnya pelanggaran terhadap perda, yang tentu saja tidak mudah, dimana karakteristik masyarakat tertentu kita yang cenderung tidak patuh dan mensiasati hukum. Selanjutnya, dalam upaya mengurangi gangguan trantibum di Jawa Timur, pelibatan Satpol PP sebagai mitra aparat Kepolisian dalam upaya menciptakan rasa aman semakin dapat ditemukan dalam kegiatan bersama yang ditandai dengan hadirnya Satpol PP dalam berbagai kegiatan apel siaga cipta kondisi. Sedangkan meningkatkan pelibatan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu kegiatan trantibum, bencana dan kebakaran, Pemilu serta kegiatan lainnya menjadi prioritas sasaran Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.

Disisi lain, peran Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur, dihadapkan pada percepatan/akselerasi penguatan kelembagaan agar sasaran yang diharapkan dapat segera tercapai.

Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam rangka perubahan Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
2. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan trantibumlinmas.
3. Terwujudnya pelibatan Satlinmas dalam penyelenggaraan trantibum serta bencana dan kebakaran.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan damkar.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Timur serta target kinerja dalam perubahan Renstra 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Proja Provinsi Jawa Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja Tujuan/Sasaran							
					2019		2020		Target Kinerja			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan Lama											
	Meningkatkan Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	5%	4,60%	5%	5%				
		Meningkatnya ketertiban umum masyarakat	Persentase Tindakan Preventif	%	5%	6,82%	5%	27,25%				
		Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran	Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang terlatih	%	5%	4,60%	5%	5%				
2	Tujuan Baru											
	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat	%					80%	85%	90%	95%
		Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	%						80%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur pada perubahan Rencana Strategis 2019-2024 dilakukan melalui strategi :

1. Sosialisasi dan patroli penegakan Perda/Perkada dengan melibatkan masyarakat serta peningkatan pemberdayaan PPNS.
2. optimalisasi perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan trantibumlinmas;
3. Pembangunan dan pengembangan media center untuk sinergitas data penyelenggaraan trantibum linmas.
4. Pembentukan dan pembinaan Desa Sigap.
5. Penyusunan pemetaan daerah rawan kebakaran.
6. Pembinaan dan pengawasan, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur harus selaras dan menyesuaikan dengan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedepan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan langkah tindak prioritas antara lain sebagai berikut, penataan lembaga dan penambahan personil. mengadakan pendidikan/pelatihan, pembekalan, penyegaran dan pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, Satlinmas, dan damkar, bekerja sama dengan TNI/Polri, Kejaksaan dan Instansi lain serta diklat bagi unsur pimpinan/pejabat struktural, membentuk Trenggana yaitu Tim Relawan Penanggulangan Bencana, Tim Reaksi Cepat yaitu tim yang sigap melakukan antisipasi terhadap laporan gangguan trantibumlinmas maupun dalam penyelenggaraan trantibumlinmas, Tim Deteksi Dini Satpol PP sebagai intelijen dan Tim PTI yang bertugas melakukan penegakan disiplin internal dan penegakan SOP kegiatan, serta pembentukan Pusat Komando SIGAP (Puskogap).

Melakukan pengkajian dan penyusunan prosedur dan protap penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya serta tibumtramas, inventarisasi, pengkajian,

sosialisasi dan penertiban Perda-Perda yang bersanksi hukum dan keputusan kepala daerah lainnya serta operasional pemeliharaan tramtibum di Jawa Timur bersama dengan aparat Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Instansi-Instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan instansi lainnya dan dengan Instansi Pembina, Kemendagri.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berencana secara bertahap meningkatkan SDM aparat dengan menerapkan teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi sehingga diharapkan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja semakin handal, profesional dan tanggap teknologi. Data informasi dari kabupaten/kota maupun instansi terkait lainnya dapat terakses dengan fasilitas jaringan network internet melalui pemasangan jaringan provider, sehingga data tibumtramas dan penegakan Perda dapat tersaji secara up to date dan valid.

Kegiatan penyelenggaraan tibumtramas dan penegakan Perda semakin meningkat sebagai akibat dari semakin banyaknya jumlah Perda yang ada. Dengan dukungan dana dan sarana prasarana operasional yang lengkap serta memadai, diharapkan segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sehari – hari dengan rasa aman dan tentram. Agar seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat, pelaksanaan kegiatan penegakan yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja sehingga diharapkan setiap kegiatan penegakan Perda selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penertib dan penegak Perda.

5.2. Arah Kebijakan

Sasaran tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Pembentukan dan pengorganisasian Kader Penegak Perda;

2. Penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibum dengan Kabupaten/Kota;
3. Pemusatan dan pengintegrasiaan data penyelenggaraan trantibum linmas;
4. Pengukuhan dan pemberdayaan Satlinmas dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
5. Pendataan jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi, SDM dan sarpras sesuai SPM;
6. Pendidikan dan pelatihan aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi damkar sesuai Permendagri Nomor 16 tahun 2009.

Setiap sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut – turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong			
Misi : Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Jawa Timur	Sosialisasi dan patroli penegakan Perda/Perkada dengan melibatkan masyarakat dan peningkatan pemberdayaan PPNS	Pembentukan dan pengorganisasian Kader Penegak Perda dan peningkatan pembentukan PPNS Penegak Perda
		optimalisasi perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	Penyusunan dan penetapan rencana aksi penyelenggaraan trantibum dengan Kab/Kota
		Pembangunan dan pengembangan media center untuk sinergitas data penyelenggaraan trantibum linmas	Pemusatan dan pengintegrasiaan data penyelenggaraan trantibum linmas
		Pembentukan dan pembinaan Desa Sigap	Penguatan dan pemberdayaan Satlinmas dalam kegiatan pelindungan masyarakat
	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Penyusunan pemetaan daerah rawan kebakaran	Pendataan jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi, SDM dan sarpras sesuai SPM
		Pembinaan dan pengawasan, pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pendidikan dan pelatihan aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi damkar sesuai Permendagri No 16 tahun 2009.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6. 1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2019

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	2019		Unti Kerja Perangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian	Rp.		
Meningkatkan Pelayanan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	%	100%	1.114.585.408	Sekretariat	Surabaya
			<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	%	1	1.114.585.408		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	100%	5.355.857.889	Sekretariat	Surabaya
			<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	Paket	1	3.448.634.084		
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	Paket	1	1.907.223.805		
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		%	120,71%	7.464.851.968	Sekretariat	Surabaya
			<i>Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Konsultasi	Kali	98%	2.121.451.671		
			<i>Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah</i>	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Orang	133,33%	5.343.400.297		
			Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100%	441.063.500	Sekretariat	Surabaya
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	Jumlah dokumen perencanaan perangkatan daerah yang tersusun	Dokumen	1	11.822.300		
			<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	Jumlah laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Laporan	1	10.374.200		
			<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	Jumlah Update database perangkat daerah	Dokumen	1	56.265.000		
			<i>Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan</i>	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Dokumen	1	362.602.000		

			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tindakan Preventif	%	6,82%	2.593.585.770	Bidang Trantibum	Jatim
			<i>Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting</i>	Jumlah Pengamanan, pengawalan pejabat serta orang-orang penting	Kali	133%	446.733.271		
			<i>Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa</i>	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kali	310%	269.812.000		
			<i>Patroli wilayah trantibum</i>	Jumlah Pelaksanaan Patroli Trantibum	Kali	102%	1.153.196.381		
			<i>Penyelenggaraan Tibum dan tranmas</i>	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tibum Tranmas	Kali	166,67%	723.844.118		
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang terlatih	%	7,08%	1.686.784.595	Bidang Perlindungan Masyarakat	Jatim
			<i>Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana</i>	Jumlah Satlinmas dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan/simulasi penanggulangan bencana	Orang	150%	462.653.824		
			<i>Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)</i>	Jumlah Satlinmas dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan/simulasi pengamanan swakarsa (community policing)	Orang	225%	979.981.084		
			<i>Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran.</i>	Jumlah Satlinmas, Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti pelatihan/simulasi	Orang	50%	244.149.687		
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	4,60%	1.888.988.780	Bidang Penegakan Perda	Jatim
			<i>Penegakkan Peraturan Daerah</i>	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda	Kali	130%	1.120.985.890		
			<i>Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Perda serta Perkada</i>	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Pengawasan & Advokasi Perda serta Perkada	Kali	120%	768.002.890		
			Program Pengembangan dan pelatihan sumber daya anggota	Persentase Tingkat Pemahaman anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan	%	5,18%	1.299.400.260	Bidang Sumber Daya Aparatur	Jatim
			<i>Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim</i>	Jumlah anggota yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	Orang	110%	654.377.950		
			<i>Bimbingan teknis Aparat Satpol PP</i>	Jumlah anggota yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP	Orang	83%	283.822.380		
			<i>Pelatihan SDM dan performance PPNS se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP</i>	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Performance PPNS dan Jabatan Fungsional	Orang	84%	361.199.930		

6. 2. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2020

Tabel 6.2. Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan	Satuan	2020		Unti kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Capaian	Rp.		
Meningkatkan Pelayanan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah		Program Pelayanan Kesekretariatan Polisi Pamong Praja	Persentase Pelayanan Kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercapai	%	100%	13.414.764.984	Sekretariat	Surabaya
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	259.898.000		
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	471.197.700		
			Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	12.683.669.284		
			Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkkungan	Persentase Tindakan Preventif	%	8,43%	1.399.739.014	Bidang Trantibum	Jatim
			Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting	Jumlah Pengamanan, pengawalan pejabat serta orang-orang penting	kali	197	240.171.595		
			Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	kali	31	126.230.000		
			Patroli Wilayah Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Patroli Trantibum	kali	54	658.849.538		
			Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tibum Tranmas	kali	8	374.487.881		
			Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	4,97%	636.903.080	Bidang Penegakan Perda	Jatim
			Penegakkan Peraturan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda	kali	2	322.109.075		

			Penyuluhan, Pengawasan dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Pengawasan & Advokasi Perda serta Perkada	kali	1	314.794.005		
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang terlatih	%	4,44%	676.728.294	Bidang Perlindungan Masyarakat	Jatim
			Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Satlinmas dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan/simulasi penanggulangan bencana	orang	30	154.588.600		
			Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing)	Jumlah Satlinmas dan Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan/simulasi pengamanan swakarsa (community policing)	orang	38	319.714.924		
			Pemberdayaan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah Satlinmas, Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti pelatihan/simulasi	orang	186	202.424.770		
			Program Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Pemahaman anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan	%	13,02%	610.061.900	Bidang Sumber Daya Aparatur	Jatim
			Pelatihan Kesamaptaan Anggota Satpol PP se Jatim	Jumlah anggota yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	orang	468	300.976.400		
			Bimbingan Teknis Aparat Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP	orang	260	184.017.700		
			Pelatihan SDM dan Performance PPNS se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Performance PPNS dan Jabatan Fungsional	orang	105	125.067.800		

6. 3. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2021 – 2024

Tabel 6.3. Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (kondisi awal th 2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah (kondisi akhir)	Unti kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.			
Menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	1. 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	100	100	35.691.152.000	100	41.044.824.800	100	41.758.877.709	100	43.137.744.040	100	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
				Persentase Realisasi Anggaran					95		95		96		96	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
				Indeks Profesionalitas ASN					64		64		65		65	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	163.950.000	7	188.542.500	10	230.000.000	11	250.000.000	35	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	15.000.000	10	15.000.000	6	15.000.000	7	15.000.000	50	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur

		X XX 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	63.950.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	65.000.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	45.000.000	4	118.482.000	4	125.000.000	4	130.000.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	28.765.398.0 00	12	33.080.207.7 00	12	33.391.377.7 09	12	34.402.669.0 40	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	27.091.984.0 00	12	31.302.626.0 00	131	32.876.377.7 09	131	33.862.669.0 40	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	419.040.000	12	457.104.000	12	480.000.000	12	500.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	11.550.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	15.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	12	12	10.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	4	209.000.000	4	240.350.000	4	121.000.000	4	126.150.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			-		-	1	1.000.000	1	1.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			-		-	1	2.500.000	1	2.575.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur

		X XX 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			-		-	1	2.500.000	1	2.575.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	4	4	209.000.000	4	240.350.000	4	115.000.000	4	120.000.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	5.220.054.00 0	4	6.003.062.10 0	4	1.279.000.00 0	4	1.322.425.00 0	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	12	12	-	12	-	1	5.000.000	1	5.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	3	422.198.000	3	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	15	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					-	1	5.000.000	1	5.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			-		-	1	100.000.000	1	100.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	4.777.211.00 0	12	1.082.700.29 8	12	1.100.000.00 0	12	1.139.925.00 0	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	12.500.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	1	1	8.000.000	1	8.000.000	30	9.000.000	30	10.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	-	1	-	50	25.000.000	50	25.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	4	4	144.250.000	4	165.887.500	4	265.500.000	4	348.500.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			-		-	1	5.000.000	1	5.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			-		-	1	5.000.000	1	5.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			14.000.000		-	1	-	1	-		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	140.460.000	1	94.600.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur

		X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	9.160.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	4.840.000	1	3.500.000	1	5.000.000	1	7.500.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		-		-	1	25.000.000	1	25.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			-		79.950.000	1	100.000.000	1	150.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			441.518.000		-	1	112.000.000	1	153.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit			-		-	1	1.000.000	1	1.500.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			-		-	1	1.000.000	1	1.500.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket			106.108.000		-	1	110.000.000	1	150.000.000		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			335.410.000		-		-		-		Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa	laporan	4	4	734.782.000	4	5.057.332.938	4	5.295.000.000	4	5.420.000.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	366.000.000	12	366.000.000	12	380.000.000	12	400.000.000	60	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.500.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	356.782.000	1	4.682.332.938	1	4.900.000.000	1	5.000.000.000	5	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa	paket		5	768.729.000	5	977.432.207	4	1.065.000.000	4	1.115.000.000	20	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur

		X XX 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit		4	82.500.000	4	82.500.000	6	85.000.000	6	90.000.000	16	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		12	188.399.000	12	170.428.101	R4 = 13 R2=33	180.000.000	R4 = 13 R2=33	185.000.000	48	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		1	265.000.000	1	287.904.106	1	300.000.000	1	325.000.000	4	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
		X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			232.830.000		436.600.000	1	500.000.000	1	515.000.000	2	Sekretariat	Surabaya, Jawa Timur
	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	1,05,02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	75%	80%	3.585.566.000	80%	4.123.400.900	80%	138.635.000.000	80%	142.709.750.000	80%	Bidang Trantibum	Jawa Timur
				Presentase Penegakan Perda/Perkada	%		80%		80%		80%		80%		80%	Bidang Gakda	Jawa Timur
				Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	%		80%		80%		80%		80%		80%	Bidang Linmas	Jawa Timur
				Persentase SDM yang terlatih	%		80%		80%		80%		80%		80%	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	75%	80,00 %	2.685.566.000	85,00 %	3.088.400.900	90%	137.500.000.000	95%	141.449.750.000	95%	Bidang Trantibum, Penegakan Perda, Linmas, Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur
		1.05.02.101.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	0	250	600.000.000	250	690.000.000	250	3.000.000.000	250	3.500.000.000	1000	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	0	20	100.000.000	20	115.000.000	20	100.000.000	20	103.000.000	80	Bidang Trantibum	Jawa Timur

		1.05.02.101.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	4	550.000.000	4	632.500.000	4	600.000.000	4	618.000.000	20	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	4	640.566.000	4	736.650.900	4	575.000.000	4	1.000.000.000	20	Bidang Perlindungan Masyarakat	Jawa Timur
		1.05.02.101.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	400	545.000.000	400	626.750.000	50	25.000.000	50	25.750.000	1600	Bidang Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur
		1.05.02.101.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	2	100.000.000	2	115.000.000	2	100.000.000	2	103.000.000	10	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	10	50.000.000	10	57.500.000	10	133.000.000.000	10	136.000.000.000	40	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	Bidang Trantibum	Jawa Timur
		1.05.02.101.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	1	50.000.000	1	57.500.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur
		1.05.02.102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kegiatan	4	4	750.000.000	4	862.500.000	4	930.000.000	4	1.000.000.000	20	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur
		1.05.02.102.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	4	300.000.000	4	345.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	20	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur
		1.05.02.102.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	4	100.000.000	4	115.000.000	4	110.000.000	4	125.000.000	20	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur

		1.05.02.102.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	4	4	350.000.000	4	402.500.000	4	320.000.000	4	325.000.000	20	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur
		1.05.02.103	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kegiatan	2	2	150.000.000	2	172.500.000	2	205.000.000	2	260.000.000	10	Bidang Penegakan Perda dan Bidang Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur
		1.05.02.103.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1	1	75.000.000	1	86.250.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	Bidang Sumber Daya Aparatur	Jawa Timur
		1.05.02.103.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Laporan	4	4	75.000.000	4	86.250.000	4	105.000.000	4	110.000.000	20	Bidang Penegakan Perda	Jawa Timur
	Terwujudnya penyelenggaraan penyalaman kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	75%			80%	400.000.000	85	1.050.000.000	90	1.025.000.000		Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakakaran	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	%	75%	0%	-	80%	200.000.000	85	750.000.000	90	725.000.000	90%	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	25.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	200.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	-	4	200.000.000	3	200.000.000	3	50.000.000	12	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur

		1.05.04.1.0 1.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	-	0	-		50.000.000		25.000.000	20	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	50.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	unit	0	0	-	0	-		50.000.000		50.000.000	8	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	0	0	-	0	-	50	50.000.000	50	100.000.000	100	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	-	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	8	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 1.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/ Kota	0	0	-	0	-		100.000.000		25.000.000	10	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur

		1.05.04.1.0 1.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	2	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	75%	0%	-	80%	200.000.000	85%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 2.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	-	4	200.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	12	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur
		1.05.04.1.0 2.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	-	0	-	2	200.000.000	2	200.000.000	8	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jawa Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 ayat (1) huruf e antara lain menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud, pemerintah mengamanatkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut maka satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7 wewenang Satuan Polisi Pamong Praja;

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi :

- a. Membina masyarakat agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya;

- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Pelaksanaanya;
- c. Menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur atau dasar hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Membantu dan menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Melaksanakan perlindungan masyarakat.
- f. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran yang bersifat tidak pidana

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Jawa Timur, terdapat penyesuaian indikator kinerja sasaran yang menindaklanjuti Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diterapkan pada program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2021 serta Permendagri 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dengan penetapan indikator dan target pada tahun 2022 sampai dengan 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renstra).

7. 1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Tindakan Preventif	5,00%	27,25%					
	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	4,61%	4,28%					
	Persentase Anggota Satlinams dan Masyarakat yang terlatih	7,08%	4,44%					
	Persentase Tingkat Pemahaman anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan	5,19%	13,02%					
Permendagri 90 Tahun 2019								
	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas			80%	85%	90%	95%	95%
Permendagri 16 Tahun 2020								
	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran				80%	85%	90%	90%

7.2. Program Pendukung Nawa Bhakti Satya

Tabel 7.2. Program Pendukung Nawa Bhakti Satya

NAWABHAKTI	PROG ICON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN				KETERANGAN
					2021 (SESUAI DPA PERUBAHAN)	2022 (SESUAI DPA MURNI)	2023 (PERKIRAAN)	2024 (PERKIRAAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAWABHAKTI 8 JATIM AMANAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2376
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.950.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	118.482.000	125.000.000	130.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.091.984.000	31.302.626.000	32.876.377.709	33.862.669.040	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	419.040.000	457.104.000	480.000.000	500.000.000	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.550.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

				Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD					
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1.000.000	1.000.000	
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	2.500.000	2.575.000	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	2.500.000	2.575.000	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	241.500.000	110.073.423	115.000.000	120.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	5.000.000	5.000.000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	422.198.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	5.000.000	5.000.000	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	100.000.000	100.000.000	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.777.211.000	1.082.700.298	1.100.000.000	1.139.925.000	*Honor Anggota Korsik
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	9.000.000	10.000.000	12.500.000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	25.000.000	25.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	5.000.000	5.000.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	5.000.000	5.000.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	-	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.460.000	94.600.000	100.000.000	125.000.000	

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.160.000	12.000.000	15.000.000	20.000.000	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.840.000	3.500.000	5.000.000	7.500.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	25.000.000	25.000.000	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	79.950.000	100.000.000	150.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1.000.000	1.500.000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	1.000.000	1.500.000	
				Pengadaan Mebel	106.108.000	-	110.000.000	150.000.000	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.410.000	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.000.000	366.000.000	380.000.000	400.000.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.782.000	4.682.332.938	4.900.000.000	5.000.000.000	*Gaji PTT-PK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.500.000	82.500.000	85.000.000	90.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.399.000	170.428.101	180.000.000	185.000.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.000.000	287.904.106	300.000.000	325.000.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	232.830.000	436.600.000	500.000.000	515.000.000	

NAWABHAKTI 8 JATIM AMANAH	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	600.000.000	640.816.000	3.000.000.000	3.500.000.000	
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	103.000.000	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	550.000.000	580.000.000	600.000.000	618.000.000	
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	640.566.000	550.000.000	575.000.000	1.000.000.000	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	571.260.000	20.000.000	25.000.000	25.750.000	
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	103.000.000	
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.600.477.620	129.850.000.000	133.000.000.000	136.000.000.000	Sub Kegiatan ada Hibah Uang ke Pemerintah Pusat
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.000.000	408.000.000	500.000.000	550.000.000	
				Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000	100.000.000	110.000.000	125.000.000	

				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	350.000.000	317.000.000	320.000.000	325.000.000	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	48.740.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	
				Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	75.000.000	104.600.000	105.000.000	110.000.000	
NAWABHAKTI 8 JATIM AMANAH	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakakaran	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	-	-	50.000.000	25.000.000	
				Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	-	-	25.000.000	200.000.000	
				Pembinaan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	-	200.000.000	200.000.000	50.000.000	
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	50.000.000	50.000.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	50.000.000	25.000.000	
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	25.000.000	25.000.000	

				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	25.000.000	50.000.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	50.000.000	50.000.000	
				Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000	100.000.000	
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	100.000.000	100.000.000	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	-	-	100.000.000	25.000.000	
				Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	-	-	25.000.000	25000000	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	100.000.000	100.000.000	
				Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				Total Anggaran	114.444.465.620	172.813.216.866	181.443.877.709	186.872.494.040	

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 ini diharapkan untuk dapatnya dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan-tujuan Strategis.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 ini, semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) atau DPA pada akhir tahun, sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam kajian perubahan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, semoga dapat dijadikan salah satu pendukung dalam program pembangunan di Jawa Timur, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR**

M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si. CIPA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770323 199511 1 001